

**PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE  
DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Dhevika Putri**

**160810108**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE  
DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:**

**Dhevika Putri**

**160810108**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhevika Putri  
NPM : 160810108  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**Pengaruh Return on Asset, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau ditebitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 15 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

**Dhevika Putri**

**160810108**

**PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE  
DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Dhevika Putri  
160810108**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 15 Februari 2020**

**Baru Harahap , S.E., M .Ak.**

**Pembimbing**

## ABSTRAK

Pengukuran penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio keuangan yang bisa dilihat di laporan keuangan perusahaan yang berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, *leverage* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan manufaktur sub sektor *basic industry and chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan *Return On Asset*, *Debt to Asset Ratio*, Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 76 perusahaan yang termasuk kedalam sub sektor *basic industry and chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang dipilih secara *purposive sampling* dipilih menjadi 26 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan ialah pengolahan data dengan SPSS 21. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian dari uji T memaparkan bahwa secara *return on asset* yang mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 terjadi pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* memiliki nilai signifikan sebesar 0,979 dan *corporate governance* memiliki nilai signifikan sebesar 0,616 sehingga tidak terjadi pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis uji F memaparkan bahwa *return on asset* dengan nilai signifikan sebesar 0,000, *leverage* dengan nilai signifikannya sebesar 0,979 dan *corporate governance* yang mempunyai nilai signifikan sebesar 0,616 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Return On Asset*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Penghindaran Pajak.

## ABSTRACT

Measurement of evasion tax on a company can be identify from the ratio of finance that can be seen in the financial statements companies were related. This study aims to determine the effect of return on assets, leverage and corporate governance on tax avoidance, on manufacturing companies in the basic industry and chemicals sub sector which listed on the Indonesia Stock Exchange. The variables used in this study are Return on Assets, Debt to Asset Ratio, Independent Commissioners on the Effective Tax Rate. The population in the study is comprised of 76 companies were included the basic industry and chemicals sub - sectors listed on the Stock Exchange Indonesia. Samples were selected by purposive sampling selected into 26 companies listed on the Stock Exchange Indonesia in the period 2014-2018. Data collection techniques used are documentation technique. Processing method of the data using statistic software, processing the data with SPSS 21. The method of analysis of the data used is the method of regression linear multiple. The results of the study from the T test explained that the return on assets that have a significant value of 0,000 had a significant negative effect on tax avoidance. While the leverage has a significant value of 0.979 and corporate governance has a significant value of 0.616 so there is no effect on tax avoidance. The results of the F test analysis explained that the return on assets with a significant value of 0,000, leverage with a significant value of 0.979 and the corporate governance that have a significant value of 0.616 simultaneously have a significant effect on tax avoidance.

**Keywords:** *Return On Asset, Leverage, Corporte Governance, Tax Avoidance.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Handra Tipa, S.PdI., M.Ak. selaku Pembimbing Akademik pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Bapak Baru Harahap, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan doa-nya.
8. Keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
9. Teman-teman dan semua team Akuntansi angkatan tahun 2020.
10. Rekan-rekan kerja PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana yang terus memberikan semangat.
11. Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan bantuan saat penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayahnya serta taufik-Nya, Aamiin.

Batam, 15 Februari 2020

Dhevika Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.6.2 Manfaat praktis .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kajian Teori .....	14
2.1.1 Pengertian Pajak .....	14
2.1.2 Fungsi Pajak .....	15
2.1.3 Jenis-jenis pajak .....	16
2.1.4 Tarif Pajak .....	17
2.1.5 Penghindaran Pajak .....	18
2.1.6 Pengukuran Penghindaran Pajak .....	20
2.1.7 Rasio Profitabilitas .....	21
2.1.8 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas .....	22
2.1.9 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas .....	23
2.1.10 <i>Leverage</i> .....	27
2.1.11 <i>Debt to Asset Ratio</i> .....	28
2.1.12 Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	30
2.1.13 Tujuan <i>Corporate Governance</i> .....	31
2.1.14 Prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	32
2.1.15 Manfaat <i>Corporate Governance</i> .....	33
2.1.16 Pengukuran <i>Corporate Governance</i> .....	33
2.2 Penelitian Terdahulu .....	36



2.3	Kerangka Berpikir .....	39
2.4	Hipotesis Penelitian.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Desain Penelitian.....	41
3.2	Operasional Variabel.....	43
3.2.1	Variabel Dependen .....	43
3.2.2	Variabel Independen.....	44
3.3	Populasi dan Sampel .....	47
3.3.1	Populasi .....	47
3.3.2	Sampel .....	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.4.1	Jenis dan Sumber Data .....	49
3.4.2	Metode Pengumpulan Data .....	50
3.5	Metode Analisis Data .....	50
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	51
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	52
3.5.3	Pengujian Hipotesis .....	56
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	60
3.6.1	Lokasi Penelitian .....	60
3.6.2	Jadwal Penelitian.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil Penelitian.....	61
4.1.1	Statistik Deskriptif.....	61
4.1.2	Uji Asumsi Klasik .....	62
4.1.2.1	Hasil Uji Normalitas .....	62
4.1.2.2	Hasil Uji Autokorelasi.....	65
4.1.2.3	Hasil Uji Multikolinieritas.....	66
4.1.2.4	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	67
4.1.3	Uji Hipotesis.....	68
4.1.3.1	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	68
4.1.3.2	Hasil Uji t .....	70
4.1.3.3	Hasil Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (Uji F) .....	72
4.1.3.4	Hasil Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	73
4.2	Pembahasan .....	73
4.2.3	Pengaruh <i>Return on Asset</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	73
4.2.4	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	74
4.2.5	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	75
4.2.6	Pengaruh <i>Return on Asset, Leverage, dan Corporate Governance</i> secara bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak .....	76

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan.....77  
5.2. Saran.....78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pendukung Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Berpikir .....	40
<b>Gambar 3.1</b> Desain Penelitian .....	42
<b>Gambar 4.1</b> Hasil Uji Histogram.....	64
<b>Gambar 4.2</b> Hasil Uji P-Plot.....	65
<b>Gambar 4.3</b> Hasil Uji <i>Scatterplot</i> .....	68

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Daftar Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.....	8
<b>Tabel 3.1</b> Definisi Operasional Variabel .....	46
<b>Tabel 3.2</b> Lanjutan.....	47
<b>Tabel 3.3</b> Sampel Penelitian .....	49
<b>Tabel 3.4</b> Jadwal Penelitian.....	60
<b>Tabel 4.1</b> Statistik Deskriptif.....	61
<b>Tabel 4.2</b> Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	63
<b>Tabel 4.3</b> Hasil Uji <i>Run Test</i> .....	66
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Uji Multikolinieritas.....	67
<b>Tabel 4.5</b> Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	69
<b>Tabel 4.6</b> Hasil Uji t .....	71
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Uji F .....	72
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	73

## DAFTAR RUMUS

<b>Rumus 2.1</b> Perhitungan <i>Effective Tax Rate</i> .....	20
<b>Rumus 2.2</b> Perhitungan <i>Cash Effective Tax Rate</i> .....	21
<b>Rumus 2.3</b> Perhitungan <i>Book-Tax Difference</i> .....	21
<b>Rumus 2.4</b> Perhitungan <i>Return On Asset</i> .....	24
<b>Rumus 2.5</b> Perhitungan <i>Return On Equity</i> .....	25
<b>Rumus 2.6</b> Perhitungan <i>Net Profit Margin</i> .....	25
<b>Rumus 2.7</b> Perhitungan <i>Gross Profit Margin</i> .....	26
<b>Rumus 2.8</b> Perhitungan <i>Return On Invesment</i> .....	27
<b>Rumus 2.9</b> Perhitungan <i>Debt to Assets Ratio</i> .....	28
<b>Rumus 2.10</b> Perhitungan <i>Debt to Equity Ratio</i> .....	29
<b>Rumus 2.11</b> Perhitungan <i>Long Term Debt To Equity Ratio</i> .....	29
<b>Rumus 2.12</b> Perhitungan <i>Time Interest Earned</i> .....	30
<b>Rumus 2.13</b> Perhitungan <i>Fixed Charge Coverage</i> .....	30
<b>Rumus 2.14</b> Perhitungan Komisaris Independen .....	34
<b>Rumus 2.15</b> Perhitungan Kepemilikan Manajerial .....	35
<b>Rumus 2.16</b> Perhitungan Kepemilikan Institusional .....	35
<b>Rumus 2.17</b> Perhitungan Komite Audit .....	36
<b>Rumus 3.1</b> Rumus <i>Effective Tax Rate</i> .....	44
<b>Rumus 3.2</b> Rumus <i>Return On Asset</i> .....	45
<b>Rumus 3.3</b> Rumus <i>Debt to Asset Ratio</i> .....	45
<b>Rumus 3.4</b> Rumus Komisaris Independen .....	46
<b>Rumus 3.5</b> Regresi Linear Berganda.....	56
<b>Rumus 3.6</b> Koefisien Determinasi .....	60
<b>Rumus 4.1</b> Regresi Linier Berganda .....	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk membiayai belanja negara baik belanja pembangunan maupun belanja yang bersifat rutin (Wijayanti, Wijayanti, & Samrotun, 2016). Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk membiayai program pembangunan negara seperti jalan, jembatan dan gedung-gedung. Sedangkan belanja rutin meliputi belanja pegawai, cicilan utang, belanja belanja barang. Oleh karena itu, seyogianya semakin banyak penerimaan pajak semakin banyak pula pembangunan prasarana umum serta semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sudah selayaknya masyarakat mengetahui pentingnya pajak dan tidak ada keterpaksaan dalam membayar pajak.

Sumber pajak Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang termasuk sebagai Wajib pajak badan dari berbagai sektor industri. Semakin besar penghasilan yang didapat perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tinggi pajak terhutang yang wajib dibayarkan perusahaan tersebut membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang yang besar tersebut (Jessica & Toly, 2014). Namun dalam implementasinya pemerintah memiliki perspektif yang berbeda dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan terkait dengan penerimaan pajak.

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang terus meningkat sehingga penerimaan tersebut dapat mencukupi kebutuhan negara. Berbagai cara telah dilakukan pula oleh pemerintah demi tercapainya peningkatan penerimaan negara terutama pada sektor perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu menyempurnakan perundang-undangan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan diperbarui menjadi UU No. 36 Tahun 2010. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya perubahan undang-undang tersebut wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak (Prasiwi, 2015).

Berbanding terbalik dengan perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba yang diperoleh sehingga perusahaan mengharapkan pembayaran pajak yang serendah mungkin. (Adisamartha & Noviari, 2015) mengungkapkan bahwa perusahaan dapat memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan yang berbeda, salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung berupaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Menurut (Vany, 2017) perlawanan pajak terdiri dari perlawanan pajak pasif dan perlawanan pajak aktif. Perlawanan pajak pasif berupa perlawanan dalam bentuk hambatan-hambatan yang memperumit pemungutan pajak. Sedangkan perlawanan aktif meliputi kegiatan yang secara langsung ditunjukkan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak yang terutang.

Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). (Budiman & Setiyono, 2012) menjelaskan penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu

upaya yang bertujuan untuk mengurangi pajak yang terutang dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kejadian yang dianggap sebagai penghindaran pajak ialah wajib pajak yang berusaha agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit dengan memanfaatkan celah dari undang-undang pajak, berusaha agar dasar pengenaan pajak lebih kecil, serta berusaha untuk menunda penghindaran pajak. Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia yang sudah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut (Nafiah, 2017) yaitu kasus PT. Asian Agri. PT. Asian Agri yang meningkatkan biaya operasional perusahaan sehingga mengalami kerugian palsu dan melakukan *transfer pricing* atau mengirimkan kerugian yang dialami kepada perusahaan anak lainnya.

Sedangkan penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mengurangi pajak dengan cara-cara ilegal. Menurut (Dharma & Ardiana, 2016) *tax evasion* merupakan usaha penghindaran pajak yang bersifat legal seperti melaporkan pendapatan yang rendah atau melaporkan tingkat pengurang pendapatan yang tinggi. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Salah satu contoh penggelapan pajak yaitu dilakukan oleh Grup Bakrie. 3 perusahaan milik Grup Bakrie ditemukan kurang bayar pajak. Ketiga perusahaan tersebut antara lain PT. Kaltim Prima Coal kurang bayar sekitar Rp 1,5 triliun, PT. Bumi Resources kurang bayar sekitar Rp 376 miliar dan PT. Arutmin kurang bayar sebesar US\$ 27,5 juta.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Agusti, 2014) bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain *Return On Asset*, *Leverage* dan *Corporate Governance*. (Fahmi, 2011) mengungkapkan *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva. (Tandelilin, 2010) menjelaskan bahwa *Return On Asset* (ROA) ialah mencerminkan sejauh mana kapasitas aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan mampu memperoleh laba. ROA digunakan pula untuk mengukur apakah manajemen mampu menggunakan aktiva dengan optimal. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan. Apabila laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak yang terutang akan semakin besar. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang terkait dengan ROA terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan laba yang tinggi akan lebih mudah untuk memanfaatkan celah dalam mengendalikan jumlah pajak yang terutang. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) menjelaskan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dimana berlaku pada perusahaan pada sektor yang diteliti. Dengan profitabilitas yang semakin tinggi, perusahaan dianggap mampu untuk membayar pajak yang terutang sehingga semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

*Leverage* ialah rasio yang menghitung seberapa besar penggunaan pendanaan melalui utang atau persentase aset perusahaan dibiayai oleh utang (Fahmi, 2015). Sedangkan menurut (Utari, 2014) mengungkapkan bahwa *leverage* adalah pemanfaatan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham seperti sumber dana yang berasal dari pinjaman, dimana pinjaman memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. *Leverage* terdiri dari 3 macam yaitu *leverage* operasi, *leverage* keuangan dan *leverage* gabungan. *Leverage* operasi digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. *Leverage* keuangan adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dimana akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.

Sedangkan *leverage* gabungan terjadi saat perusahaan memiliki *leverage* operasi dan *leverage* keuangan. Semakin banyak kegiatan perusahaan yang didanai oleh pinjaman, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang harus

dibayarkan oleh perusahaan. Dalam hubungannya dengan perpajakan, beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya akan mengurangi besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan memanfaatkan *leverage* agar profit yang diperoleh lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang didapat pemegang saham meningkat (Marfu'ah, 2015). (Alviyani, 2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang meminjam dana dari pihak ketiga akan menimbulkan bunga yang harus dibayar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1, bunga pinjaman dapat dikurangkan terhadap pendapatan sebelum pajak.

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) yang menjelaskan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang tinggi memiliki beban bunga serta resiko yang tinggi pula. Apabila perusahaan banyak menggunakan dana yang berasal dari pinjaman maka laba perusahaan menjadi tidak optimal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 2013) yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Darmawan & Sukartha, 2014) *corporate governance* ialah perusahaan *Go Public* di Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan *corporate governance* yaitu tata kelola perusahaan yang mengungkapkan hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan dalam

memutuskan kinerja perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan konflik keagenan. Konflik tersebut bisa saja terjadi jika manajer perusahaan dengan pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda atau tidak sejalan. Manajer perusahaan lebih memprioritaskan kegiatan operasional perusahaan dengan tidak membagikan laba yang diperoleh. Sedangkan pemegang saham menginginkan dividen yang maksimal. Semakin banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perusahaan *Go Public* di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 2013) menjelaskan bahwa *corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suardana & Maharani, 2014) yang mengungkapkan bahwa *corporate governance* yang diukur dengan kualitas audit dengan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit menunjukkan bahwa perusahaan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* sulit untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan komite audit akan lebih bertanggung jawab terhadap dan transparansi dalam menyampaikan laporan keuangan dikarenakan komite audit akan memantau semua kegiatan yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) yang menjelaskan *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 1.1** Daftar Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018

NO	KODE PERUSAHAAN	PENGHINDARAN PAJAK				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	AKPI	0,433	0,459	0,310	0,581	0,300
2	ALDO	0,253	0,258	0,255	0,248	0,257
3	AMFG	0,233	0,265	0,253	0,393	0,410
4	ARNA	0,249	0,254	0,262	0,265	0,253
5	CPIN	0,171	0,197	0,435	0,233	0,230
6	DPNS	0,155	0,167	0,185	0,212	0,240
7	EKAD	0,306	0,291	0,234	0,258	0,270
8	IGAR	0,276	0,187	0,276	0,244	0,277
9	IMPC	0,184	0,119	0,236	0,181	0,102
10	INAI	0,327	0,499	0,388	0,261	0,375
11	INCI	0,029	0,118	0,249	0,250	0,243
12	INTP	0,223	0,228	0,067	0,187	0,182
13	IPOL	0,504	0,607	0,371	0,406	0,336
14	ISSP	0,180	0,184	0,260	0,577	0,183
15	JPFA	0,291	0,248	0,215	0,364	0,253
16	KDSI	0,233	0,230	0,260	0,261	0,262
17	LION	0,220	1,009	0,225	0,540	0,386
18	LMSH	0,327	0,489	0,336	0,259	0,425
19	PICO	0,210	0,142	0,254	0,126	0,116
20	SMBR	0,168	0,201	0,258	0,298	0,477
21	SMGR	0,214	0,227	0,108	0,256	0,248
22	TALF	0,253	0,226	0,266	0,328	0,277
23	TBMS	0,267	0,358	0,252	0,286	0,250
24	TOTO	0,231	0,252	0,329	0,261	0,233
25	TPIA	0,268	0,530	0,251	0,212	0,282
26	WTON	0,217	0,166	0,172	0,188	0,214

**Sumber** : Data diolah peneliti (2020)

Dalam Tabel 1.1 Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan (ETR) *Effective Tax Rate* yang dapat dihitung dengan biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR bertujuan untuk mendapatkan informasi yang nyata bagaimana perusahaan berupaya untuk meminimalkan jumlah kewajiban

pajaknya. ETR memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Semakin rendah presentase ETR menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengalami fluktuasi yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak terhadap perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peningkatan atau penurunan *return on asset* yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Apabila *return on asset* meningkat, maka perusahaan kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak.
2. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage* yang dimiliki perusahaan. Apabila *leverage* suatu perusahaan tinggi, maka perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak.
3. *Corporate governance* mempengaruhi penghindaran pajak. Apabila *corporate governance* suatu perusahaan buruk, maka akan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

### 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dapat bermanfaat serta agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data laporan keuangan periode 2014-2018.
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur pada sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang selama 5 tahun berturut-turut menerbitkan laporan keuangan dan menghasilkan laba.
3. Penelitian ini berfokus pada masalah *Return On Asset*, *Leverage (Debt to Asset Ratio)*, dan *Corporate Governance* (Komisaris Independen) terhadap Penghindaran Pajak (*Effective Tax Rate*).

### 1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?
2. Apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?

3. Apakah *Corporate Governance* (CG) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?
4. Apakah *Return on Asset*, *Debt to Asset Ratio* dan *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apakah *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* (CG) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.



4. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset*, *Debt to Asset Ratio* dan *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *Basic Industry and Chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan teori tentang *return on asset*, *debt to asset ratio* dan *corporate governance*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu akuntansi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan pula dapat menambah wawasan mengenai *return on asset*, *debt to asset ratio* dan *corporate governance*.

### **1.6.2 Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masing-masing pihak.

1. Bursa Efek Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan manfaat kepada perusahaan-perusahaan, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk

lebih memperhatikan tentang *return on asset*, *debt to asset ratio* dan *corporate governance*.

2. Bagi institusi (Universitas Putera Batam)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana belajar dan sumber informasi untuk memahami penghindaran pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan pula dapat menambah wawasan mengenai penghindaran pajak.

4. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pembelajaran serta sebagai sumber informasi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (secara paksa) dimana rakyat tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara (Abdullah, 2017). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2011) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dimana jasa timbal balik didapatkan secara tidak langsung dan digunakan untuk membiayai negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pajak adalah sumbangan yang bersifat wajib dan memaksa dari orang pribadi atau badan kepada kas negara, dengan imbalan secara tidak langsung dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang bersifat wajib dan memaksa, yang dipungut berdasarkan undang-undang dimana rakyat tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

(Resmi, 2011) menjelaskan bahwa pajak memiliki 2 fungsi utama yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair* atau disebut juga dengan fungsi sumber keuangan negara yang artinya pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai belanja negara baik belanja pembangunan maupun belanja yang bersifat rutin. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk membiayai program pembangunan negara sedangkan belanja rutin meliputi pengeluaran negara yang bersifat terus-menerus. Pemerintah selalu berupaya agar mendapatkan dana yang sebanyak-banyaknya dari sumber perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan pajak yang diperbaharui sehingga mengurangi celah wajib pajak untuk melakukan kecurangan.

2. Fungsi *regularend*

Fungsi *regularend* atau disebut juga dengan fungsi pengatur yang artinya pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengimplemetasikan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Hal tersebut dijelaskan pula oleh (Mardiasmo, 2011) yaitu pajak memiliki 2 fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Dalam fungsi anggaran, pajak termasuk salah satu penerimaan negara yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara.

## 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dalam fungsi ini, pajak berfungsi untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : Minuman keras dikenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

### 2.1.3 Jenis-jenis pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut golongannya

Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri atau tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada wajib pajak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada wajib pajak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai.

#### 2. Menurut sifatnya

Jenis pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan subjeknya atau pajak yang melihat keadaan dari wajib pajak. Berbeda dengan pajak objektif yang berdasarkan pada objeknya, tidak melihat keadaan wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif yaitu pajak penghasilan sedangkan pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai. Dalam pajak penghasilan, disebut memperhatikan diri wajib pajak karena tarif pajak penghasilan berbeda-beda dalam setiap tingkatan

penghasilan, berbeda dengan pajak pertambahan nilai yang tarifnya tunggal yaitu 10%.

3. Menurut lembaga pemungutnya

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai rumah tangga daerah.

#### **2.1.4 Tarif Pajak**

Tarif pajak yaitu presentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memutuskan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Beberapa tarif pajak menurut (Resmi, 2011) adalah sebagai berikut:

1. Tarif tetap

Tarif yang terdiri dari suatu jumlah atau angka yang tetap. Walaupun dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tetapi jumlah pajak ini tetap.

2. Tarif proporsional (sebanding)

Tarif yang terdiri dari suatu presentase yang tetap. Walaupun dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tetapi presentase yang dikenakan pajak ini tetap.

3. Tarif progresif (meningkat)

Tarif pajak yang semakin meningkat jika dasar pengenaan pajak meningkat. Tarif progresif ini dibagi menjadi:

- a. Tarif progresif – proporsional
- b. Tarif progresif – progresif
- c. Tarif progresif – degresif
- d. Tarif degresif.

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara baik wajib pajak pribadi dan badan. Pada umumnya, pemilik modal suatu perusahaan berat hati untuk menyisihkan laba yang didapatkan dari kegiatan operasional perusahaan untuk membayarkan pajak. Tetapi para pemilik modal tidak dapat menghindar sepenuhnya dari utang yang seharusnya dibayarkan. Hanya saja jumlah pajak yang terutang tersebut dapat berkurang tanpa adanya status kurang bayar.

### **2.1.5 Penghindaran Pajak**

Terdapat 2 usaha yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang yaitu :

- a. Menurunkan pendapatan perusahaan
- b. Meningkatkan beban perusahaan

Semua usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau meringankan jumlah beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut dengan penghindaran pajak atau disebut juga dengan istilah *tax avoidance*. Sedangkan *tax evasion* yaitu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2011).

Menurut (Pohan, 2018) perilaku wajib pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu usaha mengurangi jumlah pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. (Janrosl, 2019) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak merupakan sebuah skema peristiwa yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan suatu negara. Teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan itu sendiri atau disebut juga dengan *grey area*. Salah satu kasus penghindaran pajak yang diungkapkan oleh (Janrosl & Efriyenti, 2018) yaitu BCA yang merasa keberatan dengan koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Laba fiskal yang ditemukan petugas fiskus sebesar Rp 6,78 triliun. Sedangkan menurut perhitungan BCA, jumlah tersebut harus dikurangi transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebesar Rp 5,77 triliun. BCA mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran pajak. Walaupun tindakan tersebut sudah terindikasi penghindaran pajak. Sedangkan *tax evasion* yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara-cara yang ilegal seperti menyembunyikan data yang sebenarnya terjadi. Contoh dari *tax evasion* yaitu wajib pajak mencatat pembukuan ganda, melaporkan pendapatan yang kecil dalam SPT, dan memalsukan dokumen transaksi.

Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak akan menanggung resiko, dimana resiko ini akan merugikan perusahaan seperti



masyarakat akan memberikan reputasi yang buruk terhadap perusahaan. Selain itu penghindaran pajak juga berdampak pada kerugian negara dikarenakan penerimaan negara akan menurun. Tetapi pemerintah tidak mampu membebaskan denda ataupun sanksi kepada perusahaan karena penghindaran pajak tersebut tidak melanggar undang-undang, maka tidak diatur pula hukumannya dalam undang-undang (Lestari & Putri, 2017). Menurut (Jasmine, 2017) penghindaran pajak bertujuan untuk merekayasa usaha yang dimiliki wajib pajak agar beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan untuk memaksimalkan keuntungan wajib pajak.

#### 2.1.6 Pengukuran Penghindaran Pajak

(Susanti, 2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan cara antara lain:

a. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR dapat menunjukkan perbedaan perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal. Berfungsi untuk menghitung tingkat efektivitas dari tindakan penghindaran pajak, ETR digunakan karena dianggap dapat menggambarkan perbedaan yang konsisten antara laba akuntansi dengan laba fiskal. ETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

**Rumus 2.1** Perhitungan *Effective Tax Rate*

b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR dapat menunjukkan tingkat keagresifan perusahaan dalam merencanakan penghindaran pajak. Apabila ETR menggambarkan perbedaan yang konsisten, maka CETR memiliki kelebihan yaitu mampu menunjukkan dengan perubahan yang konsisten dan berubah-ubah. CETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

**Rumus 2.2** Perhitungan *Cash Effective Tax Rate*

c. *Book-Tax Difference* (BTD)

*Book-Tax Difference* (BTD) adalah perbandingan antara laba yang dihasilkan berdasarkan perhitungan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. BTD dapat dihitung dengan :

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba akuntansi} - \text{laba pajak}}{\text{Total aset}}$$

**Rumus 2.3** Perhitungan *Book-Tax Difference*

### 2.1.7 Rasio Profitabilitas

Bagi perusahaan yang bertujuan mendapatkan laba, laba merupakan indikator keberhasilan. Keberhasilan perusahaan dinilai dari jumlah laba yang diperoleh pada periode waktu tertentu (Harahap, 2019). Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan oleh manajemen untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba (Wijaya, 2016). Sedangkan pengertian rasio profitabilitas menurut (Fahmi, 2011) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara menyeluruh, dimana ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh suatu perusahaan baik dari transaksi penjualan maupun transaksi investasi. Berbeda pula dengan pendapat yang dijelaskan oleh (Utari, 2014), rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan

untuk meningkatkan laba dengan cara meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar serta mengurangi beban yang harus dikeluarkan.

Menurut (Kasmir, 2013) rasio profitabilitas menggambarkan rasio untuk menghitung kesanggupan perusahaan dalam memperoleh profit. Dan menurut (Halim, 2012) menyatakan bahwa profitabilitas ialah rasio yang menghitung kesanggupan yang menciptakan laba pada tingkat pemasaran aset dan modal saham.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat keefektivitas manajemen melalui perolehan laba dengan cara meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar serta mengurangi beban yang harus dikeluarkan.

#### **2.1.8 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Menurut (Kasmir, 2013) pengukuran rasio profitabilitas menyampaikan banyak manfaat untuk berbagai pihak yang bersangkutan di perusahaan. Berikut ini ada beberapa tujuan dan manfaat memakai rasio profitabilitas. Di antaranya yaitu:

- a. Untuk menghitung atau menilai laba yang didapat oleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menghitung posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menghitung pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menghitung besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

- e. Untuk menghitung produktivitas seluruh dana perusahaan yang di pakai pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat yang didapat yaitu:

- a. Memahami tingkatnya tinggi laba yang di peroleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Memahami keadaan laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun kini.
- c. Memahami pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
- d. Memahami tingginya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Memahami produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang dipakai baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

### **2.1.9 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas**

Menurut (Kasmir, 2013) pengukuran rasio profitabilitas terbagi menjadi yaitu:

- a. *Return on Asset (ROA)*

*Return on Asset (ROA)* atau pengembalian aktiva ialah rasio yang memaparkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset perusahaan, rasio ini memaparkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan (Pandia, 2012). Sedangkan menurut (Brigham, 2013), *Return on Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Lalu menurut (Kasmir, 2013) *Return on Asset* ialah digunakan untuk memaparkan kesanggupan perusahaan yang memperoleh laba profit dengan memakai total aset yang dimiliki. *Return On Asset* menggambarkan kesanggupan

perusahaan dalam memperoleh profit dari aktiva yang dipergunakan. *Return On Asset* dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih untuk pemegang saham biasa}}{\text{Total aktiva}}$$

**Rumus 2.4** Perhitungan  
*Return On Asset*

b. *Return on Equity*

Menurut (Kasmir, 2013) *return on equity* ialah pertimbangan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menciptakan laba tersebut di pihak lain atau dengan kata lain *rentabilitas* modal sendiri ialah kesanggupan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menciptakan keuntungan laba yang diinginkan untuk mengukur *return on equity* yaitu laba usaha setelah dikurangi dengan modal asing dan pajak perseroan *income tax (Earning After tax/EAT)*. (Murhadi, 2013) menjelaskan *return on equity* yaitu menggambarkan seberapa besar return yang diciptakan bagi pemegang saham bagi setiap rupiah uang yang dtanamkan, semakin tinggi *return on equity* maka semakin baik. Berdasarkan pengertian diatas mampu disimpulkan bahwa *return on equity* ialah salah satu cara yang dipakai untuk mengukur efisiensi perusahaan dengan cara membandingkan antara laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri dengan jumlah modal sendiri yang menciptakan laba tersebut dalam suatu periode. Kesanggupan perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menciptakan *profit*, laba usaha setelah dikurangi dengan bunga dan pajak (*earning after tax income*). Besarnya *return on equity* sangat berdampak oleh besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin tinggi laba yang dihasilkan maka akan semakin meningkatnya *return on equity*. Sedangkan *return on equity* ialah

rasio antara laba sesudah pajak terhadap total modal sendiri (ekuitas) yang berasal dari setoran pemilik, laba tidak dibagi dan cadangan lain yang dimiliki oleh perusahaan. *Return on equity* bisa dirumuskan yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

**Rumus 2.5** Perhitungan *Return On Equity*

c. *Profit Margin On Sales*

Menurut (Kasmir, 2013) *profit margin on sales* atau *margin* laba atas penjualan ialah salah satu rasio yang dipakai sebagai perhitungan *margin* laba atas penjualan. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan *Net Profit Margin*. Rasio ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dengan melihat besar/kecilnya laba usaha yang diperoleh dari penjualan. *Margin* laba bersih semakin tinggi maka hal ini semakin baik bagi perusahaan dikarenakan dianggap kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang cukup tinggi. *Net Profit Margin* dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

**Rumus 2.6** Perhitungan *Net Profit Margin*

d. *Gross Profit Margin*

*Gross Profit Margin* atau margin laba kotor ialah rasio profitabilitas yang dipakai untuk menghitung persentase kelebihan laba kotor terhadap pendapatan penjualan. *Gross Profit* atau laba kotor yang dimaksud ialah pendapatan penjualan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan. Biaya yang termasuk pada harga pokok penjualan atau *Cost Of Goods Sold* (CGS) adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan pembuatan suatu produk. Dengan kata

lain, rasio marjin laba kotor atau *gross profit margin* ini dipakai untuk menghitung seberapa kemampuan perusahaan menggunakan bahan dan tenaga kerjanya untuk menciptakan dan menjual produk-produknya untuk memperoleh profit. Marjin laba kotor atau *gross profit margin* ini menggambarkan suatu indikator penting karena mampu menyampaikan informasi kepada manajemen maupun investor tentang seberapa untungya kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tanpa memperhitungkan biaya tidak langsung. Marjin laba kotor ini juga mampu memberikan pengetahuan kepada investor tentang kesehatan perusahaan yang sebenarnya. Rumus *gross profit margin* antara lain :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Pendapatan Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Pendapatan Penjualan}}$$

**Rumus 2.7** Perhitungan  
*Gross Profit Margin*

e. *Return On Investment (ROI)*

Menurut (Prihadi, 2010) pada *return on invesment (ROI)*, laba yang didapat dikaitkan dengan investasi yang dipakai untuk menciptakan laba tersebut.

Terdapat 2 faktor yang mampu mempengaruhi *return on invesment* yaitu:

1. Tingkat perputaran aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan.
2. *Profit margin* adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit margin* mampu menghitung tingkat keuntungan perusahaan dengan dihubungkan dengan penjualannya. *Return on invesment* sebagai bentuk teknik analisa rasio profitabilitas. Rasio ini sangat penting dalam suatu perusahaan karena dengan mengetahui *return on invesment* mampu diketahui seberapa efisien

perusahaan guna memanfaatkan aktiva untuk kegiatan operasional dan mampu menyampaikan informasi ukuran profitabilitas perusahaan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

**Rumus 2.8** Perhitungan  
*Return On Investment*

### 2.1.10 *Leverage*

Menurut (Brigham, 2013), *ratio leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang tidak *leverage* adalah perusahaan yang jumlah utangnya lebih tinggi daripada total assetnya. Sedangkan menurut (Darmawan & Sukartha, 2014) rasio *leverage* ialah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan aktiva yang dibiayai dengan utang yang berarti bahwa besarnya beban utang yang dibebankan kepada perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan. Hal ini dijelaskan pula oleh (Susanti, 2018) bahwa *leverage* yakni rasio yang digunakan oleh perusahaan dalam melunasi utang jangka panjang. *Leverage* menggambarkan banyaknya kegiatan perusahaan yang dibiayai utang.

Menurut (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016) rasio *leverage* menunjukkan sumber dana operasi yang digunakan pada operasional perusahaan dan juga menggambarkan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. (Veronika, 2016) mengungkapkan bahwa kondisi perusahaan dapat dinyatakan baik apabila perusahaan tersebut memiliki asset yang memadai untuk melunasi semua utang perusahaan. Implikasi pada rasio *leverage* adalah sebagai berikut:



- a. Kreditur berharap bahwa ekuitas menjadi margin keamanan yang berarti investor yang memiliki dana yang relatif rendah, maka resiko terbesar bisnis ditanggung oleh kreditur.
- b. Perolehan dana dengan cara meminjam utang akan memberikan keuntungan bagi pemilik yaitu pemilik masih memiliki kendali terhadap perusahaan tersebut.
- c. Apabila dana yang dipinjam oleh perusahaan kepada pihak ketiga lebih besar jika dibandingkan dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan, pemilik akan mendapat pengembalian yang lebih besar.

#### **2.1.11 Debt to Asset Ratio**

*Debt to assets ratio (DAR)* atau *debt ratio* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur *leverage*. Menurut (Susanti, 2018) *Debt to assets ratio (DAR)* adalah rasio utang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pengaruh utang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap aktiva atau mengukur besarnya aktiva yang didanai oleh utang. Utang yang diajukan oleh perusahaan kepada pihak ketiga akan menimbulkan beban bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi beban bunga yang dibebankan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan tersebut. Laba sebelum pajak akan dikurangi dengan beban bunga, sehingga semakin tinggi beban bunga maka beban pajak perusahaan akan semakin berkurang. Angka DAR yang kecil menunjukkan keadaan keuangan perusahaan baik. Rumus DAR dapat dihitung dengan :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

**Rumus 2.9** Perhitungan *Debt to Assets Ratio*

Lebih lanjut, pengukuran rasio *leverage* selain *Debt to Asset Ratio* antara lain:

a. *Debt To Equity Ratio* (DER)

*Debt to equity ratio* menurut (Susanti, 2018) adalah salah satu rasio utang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pengaruh utang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui total dari dana yang disediakan oleh kreditur dengan pemilik perusahaan yang artinya rasio ini menunjukkan berapa jumlah modal sendiri yang akan digunakan untuk menjamin utang perusahaan. Sedangkan menurut (Sondakh, Tommy, & Mangantar, 2014) merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menganalisis

$$\text{DER} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Ekuitas}}$$

**Rumus 2.10** Perhitungan *Debt to Equity Ratio*

laporan keuangan untuk menggambarkan nilai jaminan bagi kreditur.

Rumus DER dapat dihitung dengan :

b. *Long Term Debt To Equity Ratio*

(Maulita & Tania, 2018) menjelaskan bahwa *Long term debt to equity ratio* atau disingkat dengan LDER menggambarkan utang yang bersifat jangka panjang yang ditanggung oleh para investor dari dana yang sudah disetorkan untuk setiap Rp 1 dana yang dimiliki investor. Rasio ini digunakan untuk menghitung nilai utang dengan modal atau ekuitas. LDER dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{LDER} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

**Rumus 2.11** Perhitungan *Long Term Debt To Equity Ratio*

c. *Time interest earned*

*Time interest earned* atau disingkat TIE adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam membayar bunga di periode yang akan datang (Susanti, 2018). Rumus *Time interest earned* ialah :

$$\text{TIE} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

**Rumus 2.12** Perhitungan *Time Interest Earned*

d. *Fixed Charge Coverage*

(Rachman, 2016) menjelaskan *Fixed Charge Coverage* untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi beban tetap (*fixed cost*). Contoh beban tetap antara lain pembayaran sewa gedung, angsuran pinjaman, dividen saham preferen, beban bunga, dll. Fixed Charge dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{FCC} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Sewa}}$$

**Rumus 2.13** Perhitungan *Fixed Charge Coverage*

### 2.1.12 Pengertian *Corporate Governance*

Menurut (Suardana & Maharani, 2014) *corporate governance* ialah tata kelola dalam suatu perusahaan yang memaparkan hubungan antara partisipan dalam perusahaan yang menentukan pedoman kinerja perusahaan. Hal ini dijelaskan pula oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) bahwa *corporate governance merupakan* tata kelola perusahaan yang mendeskripsikan suatu hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan dalam rangka menetapkan arah kinerja perusahaan. Sedangkan menurut (Azis, 2016) *corporate governance* mengendalikan pembagian hak serta kewajiban pihak yang berkepentingan dalam

kelangsungan hidup perusahaan. Pihak yang berkepentingan tersebut antara lain para pemegang saham, dewan pengurus, anggota *stakeholder* yang tidak memegang saham dan manajer perusahaan.

Pengertian *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* atau disingkat FCGI ialah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan baik internal maupun eksternal terkait dengan hak serta kewajiban mereka. (Lestari & Putri, 2017) mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan seperti pemegang saham, dewan pengurus, manajer serta para *stakeholder*. Sedangkan menurut (Prawira, 2018) *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder* perusahaan.

Berdasarkan pengertian yang sudah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* ialah suatu sistem, proses serta kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan seperti pemegang saham, dewan pengurus, manajer serta para *stakeholder* agar tujuan organisasi dapat tercapai.

### **2.1.13 Tujuan *Corporate Governance***

(Azis, 2016) memaparkan tujuan adanya *corporate governance* dalam suatu perusahaan antara lain:

- a. Hak dan kepentingan dari para pemegang saham terlindungi.

- b. Hak dan kepentingan dari para *stakeholders* non pemegang saham terlindungi.
- c. Nilai perusahaan meningkat.
- d. Kinerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.
- e. Terjalin hubungan yang lebih baik antara dewan pengurus dengan manajer senior perusahaan.

#### **2.1.14 Prinsip *Corporate Governance***

Prinsip *corporate governance* menurut (Azis, 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Kewajaran

Kewajaran atau disebut juga dengan *fairness* artinya memberikan perlakuan yang sama atau tidak membeda-bedakan baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Manajemen sebaiknya transparansi mengenai informasi yang penting dan melarang perdagangan saham melalui orang dalam.

- b. Transparansi

Transparansi atau disebut juga dengan *disclosure* artinya pemegang saham berhak untuk mendapat informasi yang akurat dan tepat waktu seperti kinerja manajemen, kepemilikan dan pemegang kepentingan. Dimana informasi tersebut akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

- c. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau disebut juga dengan *accountanbility* artinya manajemen memiliki tanggung jawab kepada perusahaan dan pemegang saham dalam bentuk

pengawasan secara efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, dewan komisaris, manajer dan auditor.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas atau disebut juga dengan *responsibility* artinya berdasarkan hukum yang berlaku serta kerjasama yang telah terjalin antara perusahaan dan pemegang saham dalam meningkatkan kekayaan, menciptakan lapangan kerja, kondisi keuangan yang sehat maka pemegang saham harus diakui.

**2.1.15 Manfaat Corporate Governance**

Tata kelola perusahaan yang baik dapat terjadi apabila terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengelola perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, manfaat dari penerapan *corporate governance* yaitu:

- a. Memudahkan perusahaan dalam meningkatkan modal.
- b. Biaya modal yang semakin rendah.
- c. Kinerja bisnis dan ekonomi meningkat.
- d. Berpengaruh positif terhadap harga saham.

**2.1.16 Pengukuran Corporate Governance**

(Azis, 2016) mengungkapkan bahwa *Corporate governance* dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. **Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan salah satu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen perusahaan, anggota dewan komisaris lain dan tidak memiliki hubungan yang dapat berpengaruh terhadap tindakannya yang

independen. (Asri & Suardana, 2016) menjelaskan bahwa komisaris independen diharapkan mampu meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi dalam laporan manajemen kepada petugas perpajakan. Menurut (Wulandari & Budiarta, 2016) komisaris independen memiliki peran yang penting dalam suatu perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan serta memberikan perlindungan bagi investor. Syarat komisaris independen pada perusahaan publik sebagaimana diatur dalam surat edaran PT. Bursa Efek Indonesia yaitu :

1. Komisaris independen berasal dari luar perusahaan publik.
2. Tidak memiliki saham langsung dan saham tidak langsung pada perusahaan publik.
3. Tidak memiliki hubungan dengan komisaris, direksi, dan pemegang saham perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan kegiatan usaha perusahaan publik.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam penerapan *corporate governance* adalah CEO yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Dimana dewan komisaris ini memiliki tugas untuk mengamati kinerja dari CEO tersebut. Maka dari itu diperlukanlah seorang komisaris independen yang diharapkan mampu menyalurkan situasi tersebut. Rumus untuk menghitung proporsi dewan komisaris independen yaitu:

$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris perusahaan}}$$

**Rumus 2.14** Perhitungan Komisaris Independen

b. Kepemilikan Manajerial

Dalam kepemilikan manajerial, satu orang yang memiliki peran ganda yaitu manajer mempunyai saham perusahaan. Pemegang saham sekaligus menjadi manajer perusahaan. Informasi ini dianggap informasi yang penting sehingga dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Saham perusahaan yang dikelola}}$$

**Rumus 2.15** Perhitungan  
Kepemilikan Manajerial

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan seperti institusi berbadan hukum, pemerintah, institusi keuangan, institusi luar negeri, dll. Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusional}}{\text{Saham perusahaan yang beredar}}$$

**Rumus 2.16** Perhitungan  
Kepemilikan Institusional

d. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dewan komisaris dengan tujuan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan perusahaan. Pada umumnya komite audit dianggap pihak penghubung antara dewan komisaris dengan pihak manajemen apabila terdapat masalah pengendalian yang harus diatasi. Anggota minimal komite audit terdiri dari 3 orang yaitu satu orang komisaris independen yang menjadi ketua komite, dan anggota lainnya adalah pihak ekstern yang



independen serta memiliki pengetahuan dibidang akuntansi dan keuangan. Komite audit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KA = \frac{\text{Jumlah komite audit ekstern}}{\text{Jumlah komite audit}}$$

**Rumus 2.17** Perhitungan Komite Audit

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak yang digunakan sebagai bahan pertimbangan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*”. Penelitian ini diuji dengan menggunakan pengujian statistik. Hasil penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas pada *Tax Avoidance*”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax*

*avoidance* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia”. Hasil penelitian ini adalah profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return on Asset*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”. Hasil dari penelitian ini adalah *Corporate Governance*, *Return on Asset* dan Ukuran

Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

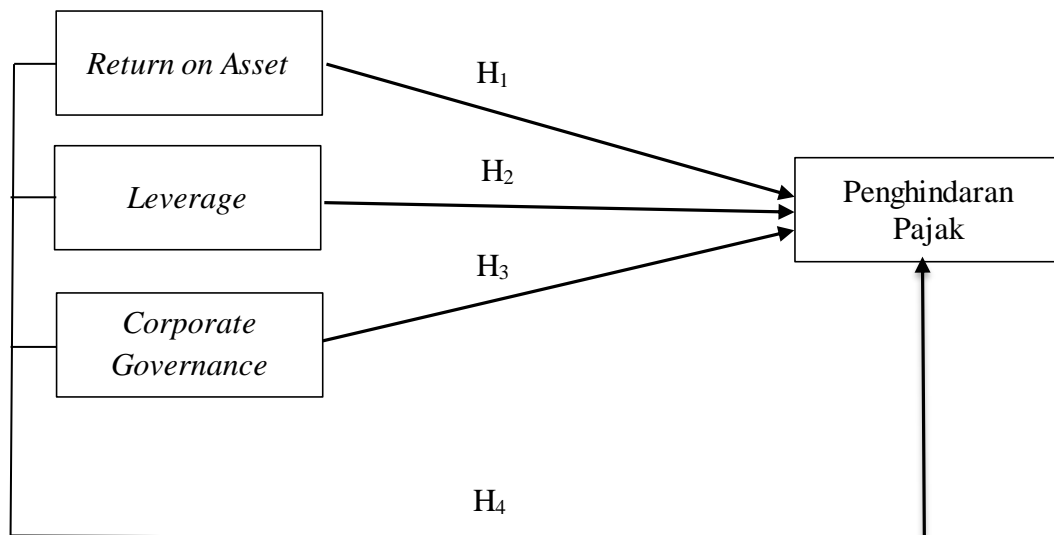
6. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Putri, 2017) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil dari penelitian ini adalah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana semakin baik *corporate governance* akan menurunkan tindakan penghindaran pajak. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya tidak ada koneksi politik pada penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, utang yang semakin tinggi mengakibatkan CETR rendah sehingga menunjukkan adanya penghindaran pajak.
7. Penelitian yang dilakukan oleh (Suardana & Maharani, 2014) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur”. Hasil dari penelitian ini ialah dewan komisaris, kualitas audit, komite audit yang merupakan indikator dari *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas yang dihitung dengan ROA berpengaruh negatif dan karakteristik eksekutif yang mengukur risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8. *Research conducted by* (Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker, 2015) *entitled “Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance” which aims to examine the relationship between corporate governance, incentives*

*and corporate tax avoidance. The results of this study indicate that by using the mean and median, there is no influence between corporate governance and tax avoidance. But when using the regression method, there is a positive relationship between corporate governance with a low level of tax avoidance and a negative relationship to a high level of tax avoidance.*

9. *Based on research conducted by (Badertscher, Katz, & Rego, 2018) entitled “The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance”. In this research explain the separation of ownership and control influences to tax avoidance of private firms with the different owner a ship. Tax avoidance is a risky activity. When there are only a few shareholder and decision makers in a company, they are less likely to make risky decisions like tax avoidance, but when more people are involved in the decision making process, they are less likely to resort to tax avoidance.*

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian yang disusun dari teori yang sudah dijelaskan (Sugiyono, 2016). Kerangka berpikir akan menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan melalui gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1** Kerangka Berpikir

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian dan paradigma penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_1$  = *Return on Asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

$H_2$  = *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

$H_3$  = *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

$H_4$  = *Return on Asset*, *Leverage*, dan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

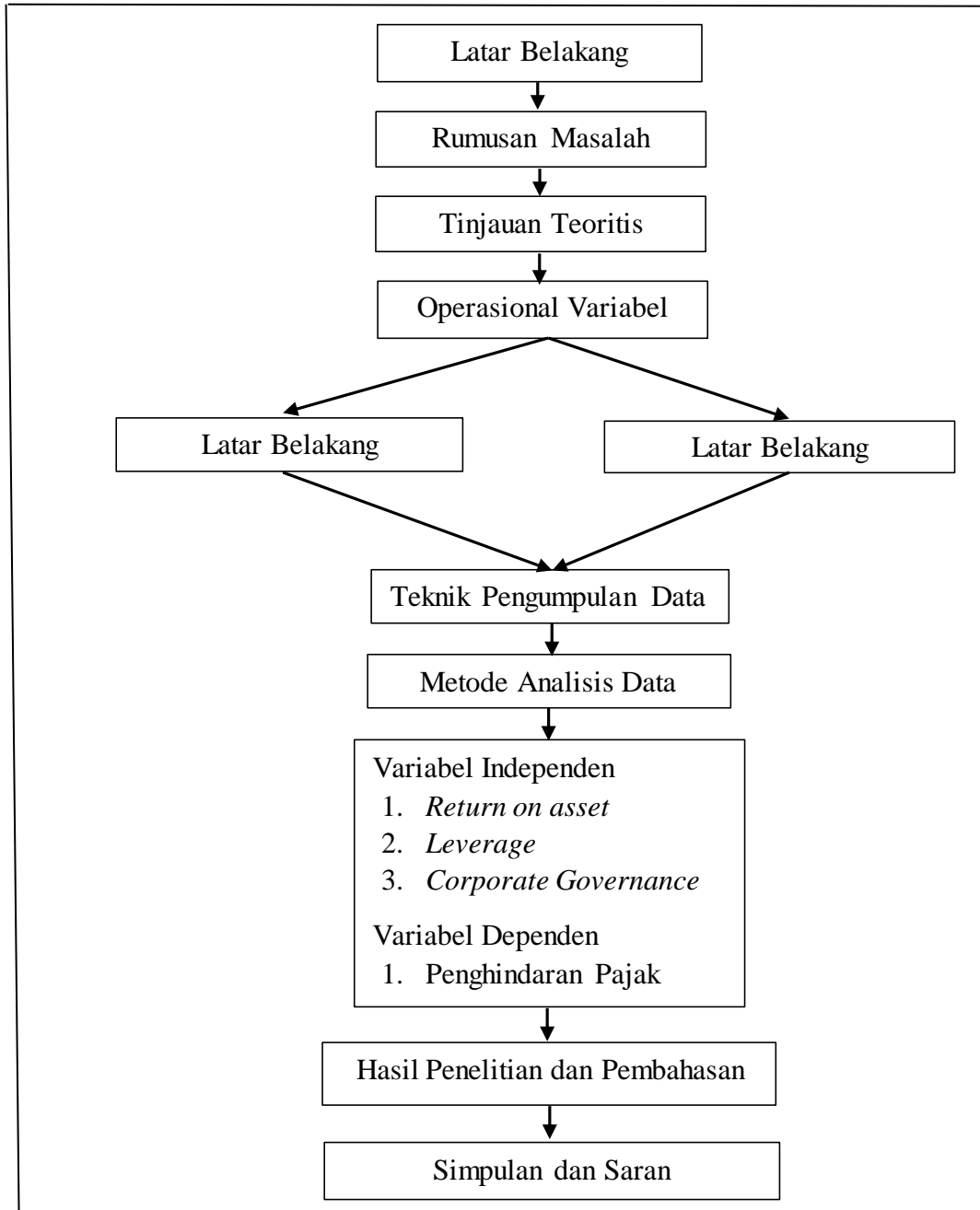
#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasar pada filsafat positivisme (memandang fenomena dapat diklasifikasikan, relatif tetap, aktual, dapat diamati, terukur, memiliki sifat sebab akibat). Digunakan untuk melakukan penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik serta bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian kuantitatif disebut juga dengan metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural.

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen terdiri dari *return on asset*, *leverage* dan *corporate governance*. *Return on asset* dihitung dengan laba bersih untuk pemegang saham biasa dibagi dengan total aktiva. Variabel *leverage* diukur dengan menggunakan pengukuran *debt to asset ratio* yaitu total utang dibagi dengan total aset. Variabel *corporate governance* diukur dengan komisaris independen dengan rumus jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis pengaruh *return on asset*, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian kuantitatif, desain penelitian merupakan langkah yang penting. Desain penelitian merupakan suatu prosedur penelitian yang digunakan

sebagai petunjuk dalam proses penelitian. Desain penelitian sebagai penuntun dan penentu arah dalam proses penelitian yang tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Desain pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : Penulis (2020)

**Gambar 3.1** Desain Penelitian

## **3.2 Operasional Variabel**

Variabel penelitian ialah karakter seseorang, peristiwa yang bervariasi dan memiliki ciri khas unik yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Pengertian definisi operasional merupakan faktor penelitian yang berkaitan dengan variabel yang ada dalam penelitian atau terdapat dalam paradigma penelitian, dimana sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan. Teori ini digunakan sebagai dasar mengapa variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat. Definisi operasional menjelaskan indikator yang akan digunakan untuk menghitung variabel secara lebih rinci (Efianingrum, 2010).

Definisi operasional variabel menurut (Chandarin, 2017) adalah definisi yang menjelaskan tata cara menghitung atau mengukur variabel. Operasional variabel bertujuan agar peneliti memiliki alat ukur yang sesuai dengan variabel yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu, peneliti harus menyusun alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2016) variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari suatu objek atau kegiatan atau bahkan orang yang memiliki variasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti, dimana akan dipelajari oleh peneliti sehingga akan diperoleh informasi tentang hal tersebut serta akan ditarik kesimpulannya.

### **3.2.1 Variabel Dependen**

Menurut (Chandarin, 2017) variabel dependen merupakan variabel yang utama dan menjadi daya tarik atau fokus peneliti. (Efianingrum, 2010) mengungkapkan bahwa variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi



serta yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen disebut juga dengan variabel terikat yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.

### 3.2.1.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah semua usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau meringankan jumlah beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pohan, 2018). Menghitung penghindaran pajak dapat menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

**Rumus 3.1** Rumus  
*Effective Tax Rate*

### 3.2.2 Variabel Independen

(Efianingrum, 2010) menjelaskan bahwa variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menyebabkan adanya variabel dependen. Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas merupakan variabel yang mengakibatkan munculnya variabel dependen atau mempengaruhi fluktuasi variabel dependen. Variabel independen dapat berpengaruh positif ataupun negatif terhadap variabel dependen. Pengaruh yang positif yaitu pengaruh yang memiliki hubungan searah. Jika nilai variabel independen mengalami peningkatan maka nilai variabel dependen juga mengalami peningkatan dan jika nilai variabel independen mengalami penurunan maka nilai variabel dependen

mengalami penurunan pula. Sedangkan pengaruh yang negatif yaitu pengaruh yang memiliki hubungan berbanding terbalik. Jika nilai variabel independen mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan variabel dependen yang mengalami penurunan dan jika nilai variabel independen mengalami penurunan, variabel dependen akan mengalami peningkatan. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain *return on asset*, *leverage* dan *corporate governance*.

### 3.2.2.1 Return on Asset

Menurut (Brigham, 2013) *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih berdasarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih untuk pemegang saham biasa}}{\text{Total aktiva}}$$

**Rumus 3.2** Rumus *Return On Asset*

### 3.2.2.2 Leverage

Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang (Kasmir, 2009). Perusahaan yang tidak *leverage* adalah perusahaan yang jumlah utangnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah aset. *Leverage* dapat dihitung dengan *Debt to Asset ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* adalah salah satu rasio utang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pengaruh utang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva. *Debt to asset ratio* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

**Rumus 3.3** Rumus *Debt to Asset Ratio*

### 3.2.2.3 Corporate Governance

*Corporate governance* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan seperti pemegang saham, dewan pengurus, manajer serta para stakeholder (Lestari & Putri, 2017). *Corporate governance* dapat dihitung dengan menggunakan rumus proporsi dewan Komisaris Independen (KI) yaitu :

$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris perusahaan}}$$

**Rumus 3.4** Rumus Komisaris Independen

**Tabel 3.1** Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Rumus	Skala
Penghindaran Pajak (Y)	Semua usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau meringankan jumlah pajak dengan tidak melanggar peraturan erundang-undangan yang berlaku (Brigham, 2013).	$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
<i>Return on Asset</i> (X <sub>1</sub> )	<i>Return On Asset</i> (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih berdasarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Brigham, 2013).	$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba bersih untuk pemegang saham biasa}}{\text{Total aktiva}}$	Rasio

Tabel 3.2 Lanjutan

Variabel	Definisi Variabel	Rumus	Skala
<i>Debt to Asset Ratio</i> (X <sub>2</sub> )	Rasio utang yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pengaruh utang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva (Kasmir, 2013).	$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
<i>Corporate Governance</i> (X <sub>3</sub> )	Sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan seperti pemegang saham, dewan pengurus, manajer, serta para stakeholder (Lestari & Putri, 2017).	$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris perusahaan}}$	Rasio

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2016) populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lalu diambil kesimpulannya. Berdasarkan pengertian diatas, populasi bukan hanya terdiri dari subjek saja, tetapi termasuk pula objek serta benda-benda alamiah lain. Populasi bukan hanya sekedar jumlah

yang terdapat dalam subjek maupun objek yang dipelajari, termasuk semua karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu sendiri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *basic industry and chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018 yang berjumlah 76 perusahaan.

### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam populasi. Jika jumlah populasi banyak, tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari keseluruhan dari populasi dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti sebaiknya menentukan sampel yang dipilih dari populasi tersebut. Hal yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Sampel yang dipilih dari populasi harus mewakili populasi atau disebut dengan representatif (Sugiyono, 2016).

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan anggota sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Peneliti menentukan kriteria yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan *basic industry and chemicals* yang sudah *go public* terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Perusahaan sampel menghasilkan laba dan menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah.
3. Perusahaan sampel memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang meliputi *return on asset*, *leverage*, dan *corporate governance*.

**Tabel 3.3** Sampel Penelitian

<b>NO</b>	<b>Kode Saham</b>	<b>Nama Emiten</b>
1	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk.
2	ALDO	Alkindo Naratama Tbk.
3	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk.
4	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.
5	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
6	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
7	EKAD	Ekadharma International Tbk
8	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk.
9	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk.
10	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk.
11	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk.
12	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk.
13	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
14	ISSP	PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk.
15	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk.
16	KDSI	Kedawung Setia Industry Tbk
17	LION	Lion Metal Works Tbk
18	LMSH	Lionmesh Prima Tbk
19	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
20	SMBR	PT. Semen Baturaja (Perseo) Tbk.
21	SMGR	Semen Indonesia Tbk
22	TALF	PT Tunas Alfin Tbk
23	TBMS	Tembaga Mulia Semana Tbk
24	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.
25	TPIA	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk
26	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.

**Sumber** : Data diolah peneliti (2020)

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.4.1 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. (Sugiyono, 2016) menjelaskan data sekunder adalah pemilik data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui laporan keuangan. Data ini diperoleh melalui studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, jurnal yang

berkaitan dengan penelitian serta pusat data referensi pasar modal PT. Bursa Efek Indonesia. Data didapat melalui sumber seperti :

1. Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))
2. Website perusahaan sampel
3. Buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul ini.

#### **3.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa pada masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental yang dimiliki seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi seseorang, peraturan dan kebijakan sedangkan dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa (Sugiyono, 2016). Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan periode 2014-2018.

#### **3.5 Metode Analisis Data**

Menurut (Sugiyono, 2016) metode analisis data adalah rangkaian proses dalam menyelesaikan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, mendeskripsikan ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun data dalam pola, menentukan mana yang penting dan yang akan dipelajari serta menyusun kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Kegiatan dalam analisis data meliputi :

1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden
2. Menyajikan data dari setiap dari setiap variabel yang akan di teliti
3. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah
4. Melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan pada pertanyaan riset dan harus disesuaikan dengan desain riset akuntansi yang telah disusun. Desain riset mencakup rencana dan struktur yang membuat peneliti mampu menjawab pertanyaan riset secara valid, objektif, akurat dan seekonomis mungkin. Oleh karena itu, desain riset akuntansi harus berisi spesifikasi yang rinci tentang observasi yang dilakukan, waktu pelaksanaan, dan analisis statistik yang tepat serta mempertimbangkan validitas hasil dan inferensi yang disimpulkan dari hasil riset tersebut (Chandarin, 2017).

### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

(Chandarin, 2017) menjelaskan untuk desain riset kuantitatif deskriptif menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu melakukan teknis analisis data yang bersifat menjelaskan atau *explain* fenomena yang dihubungkan dengan teori yang mendasari riset yang dilakukan. Teknik analisis yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan riset. Pada desain riset kuantitatif deskriptif ini akan menjelaskan bagaimana karakteristik sampel penelitian dengan menggunakan rerata, *standard deviation*, maksimum dan minimum.

Statistik deskriptif dapat digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut diambil. Statistik deskriptif mencakup



penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentase (Sugiyono, 2016).

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Dalam menentukan sebuah persamaan regresi jika memadai dipakai dalam analisis, maka yang diolah wajib memenuhi 4 asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heterokedasitas. Uji tersebut bertujuan agar persamaan regresi yang diperoleh tidak biasa dan teruji ketepatannya.

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Menurut (Sujarweni, 2012) uji normalitas sebaiknya dilakukan sebelum pengolahan data berdasarkan model-model penelitian. Uji ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam suatu penelitian yaitu data yang memiliki distribusi normal. Data berdistribusi normal yaitu data yang memiliki sebaran normal, dengan profil yang dapat dikatakan mewakili populasi yang digunakan. Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk mengukur apakah data yang dimiliki berdistribusi normal sehingga data tersebut dapat digunakan dalam statistik parametrik.

Untuk data yang tidak berdistribusi normal dapat menggunakan statistik non parametrik. Dalam uji ini, terdapat perbandingan antara data yang dimiliki peneliti dengan data yang berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data yang dimiliki peneliti. Sedangkan menurut

(Ghozali, 2013) uji normalitas bertujuan mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Dan model regresi yang baik ialah berdistribusi normal.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik yaitu yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Histogram Regression* yang sudah standar, analisis *p-plot* dan *Kolmogorov-Smirnov* (Wibowo, 2012). Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov*, *Histogram*, dan Uji *p-plot* dalam SPSS 21, dimana jika :

- a. Nilai sig < 0,05, distribusi adalah tidak normal
- b. Nilai sig > 0,05 distribusi adalah normal.

### **3.5.2.2 Uji Autokorelasi**

(Sujarweni, 2012) mengungkapkan bahwa uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi atau tidak antara variabel pengganggu dengan variabel sebelumnya pada periode tertentu. Pada data *time series*, autokorelasi kerap kali terjadi, tetapi untuk data yang sampelnya diambil dengan cara *crosssection*, jarang terjadi autokorelasi karena variabel pengganggu berbeda-beda. Sedangkan menurut (Ghozali, 2013) uji autokorelasi ini memaparkan bahwa untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear berganda ada korelasi diantara kesalahan pengganggu pada periode t-1 pada

sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka bisa dikatakan *problem* autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan salah satu aplikasi yang ada dalam program SPSS versi 21 yaitu dengan melakukan pengujian *Run Test*. *Run Test* merupakan bagian dari *statistic non-parametrik* dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Run Test* adalah :

1. Jika nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak random (sistematis).
2. Jika nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara random (acak).

### **3.5.2.3 Uji multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang mempunyai kemiripan antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya pada suatu model. Kemiripan antar variabel tersebut akan menimbulkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji ini bertujuan pula untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Sujarweni, 2012).

Menurut (Ghozali, 2013) Model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat diketahui melalui uji, dimana uji tersebut dapat mendeteksi gejala multikolinearitas pada suatu persamaan. Untuk mendeteksi gejala tersebut dapat menggunakan Uji *Variance Influence Factor* (VIF). Jika uji dilakukan dengan bantuan SPSS *for window*, apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* mendekati 1 maka tidak adanya multikolinieritas dapat diketahui.

#### **3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut (Ghozali, 2013) uji heteroskedastisitas ialah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka diaktakan itu sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik ialah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji adanya perbedaan *variance residual* pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu model regresi, dimana tidak terjadi heteroskedastisitas. Titik data menyebar diatas, dibawah dan di sekitar angka 0.

1. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
2. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
3. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

### 3.5.3 Pengujian Hipotesis

#### 3.5.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

(Chandarin, 2017) menjelaskan bahwa regresi linear berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk menguji kausalitas atau sebab akibat antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Sedangkan menurut (Suliyanto, 2011) memaparkan bahwa dalam regresi berganda variabel tergantung dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas, disamping juga mampu pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Langkah-langkah analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

1. Uji statistik deskriptif
2. Uji asumsi klasik
3. Uji signifikansi variabel (Uji t)
4. Uji ketepatan model (Uji F) dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Analisis regresi linear berganda dipakai untuk menghitung pengaruh antara *Return on Asset (ROA)*, *Leverage (DAR)*, *Corporate Governance (KI)* terhadap Penghindaran Pajak (ETR), rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

**Rumus 3.5** Regresi  
Linear Berganda

Keterangan :

Y = Penghindaran pajak

a = Konstanta

$b_1$ - $b_4$  = Koefisien Regresi

$x_1$  = *Return On Asset*

$x_2$  = *Leverage (DAR)*

$x_3$  = *Corporate Governance*

e = Error item

### 3.5.3.2 Uji t (Parsial)

Uji hipotesis penelitian pada dasarnya memaparkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas individual dan menerangkan variasi variabel terikat. Uji atau disebut juga dengan uji parsial bertujuan untuk menguji koefisien regresi parsial dari variabel independennya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan apakah pengaruh dari variabel merupakan pengaruh yang nyata atau hanya kebetulan (Ghozali, 2013)

(Chandarin, 2017) menjelaskan bahwa uji digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang telah diformulasikan dalam model. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a$  : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel bebas.

2. Rumus hipotesis yang dipergunakan menurut (Sugiyono, 2016) dalam menguji hipotesis (uji t) dalam penelitian ini ialah:

$$r = \frac{r\sqrt{n-2}}{r\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai uji t

$r$  = Koefisien Korelasi

$r^2$  = Koefisien Determinasi

$n$  = Sampel

### 3. Kriteria penguji

- a.  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau jika  $Sig < 0,05$
- b.  $H_a$  ditolak,  $H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau jika  $Sig > 0,05$

Jika  $H_0$  ditolak maka menunjukkan bahwa variabel independen memiliki hubungan signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika  $H_0$  diterima maka hal ini memaparkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

#### 3.5.3.3 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji kelayakan model pada penelitian. Menurut (Chandarin, 2017) uji F dilakukan untuk menguji apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang telah di formulasikan dalam persamaan regresi linear berganda sudah tepat. Sedangkan menurut (Ghozali, 2013) uji F digunakan untuk menjelaskan apakah variabel independen yang terdapat dalam model memiliki pengaruh yang bersamaan terhadap variabel dependen. Kategori pengujiannya adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan Hipotesis

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

$H_a$  : Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen

b. Rumus F

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

$R^2$  : Koefisien Determinasi

n : Jumlah data

k : Jumlah variabel independen

c. Kriteria Pengujian

1. Bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $Sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak
2. Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $Sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

#### 3.5.3.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yaitu uji yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kesanggupan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai *adjusted*  $R^2$  menunjukkan sejauh mana kemampuan dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen menyampaikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memperhitungkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013)

(Chandarin, 2017) menjabarkan bahwa uji koefisien determinasi adalah besaran yang menggambarkan proporsi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila hasil uji koefisien hasilnya rendah, maka tidak berarti modelnya buruk dikarenakan koefisien determinasi bukan merupakan satu-satunya indikator untuk mengukur model yang di formulasikan.



Dalam SPSS, koefisien determinasi tertelak pada tabel *summary* dan dilambangkan dengan *adjusted R square*. Nilai *adjusted R square* dikatakan baik jika nilainya 0,05. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$D = r^2 \times 100\%$$

**Rumus 3.6** Koefisien Determinasi

Keterangan :

D = Koefisien determinasi

r = Koefisien variabel bebas dan variabel terikat

### 3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

#### 3.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bursa Efek Indonesia Kota Batam, Kompleks Mahkota Raya Blok A No. 11, Jalan Raya H. Fisabillah, Batam Kota, Teluk Tering, Batam, Kepulauan Riau 29456.

#### 3.6.2 Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam 6 (enam) tahapan kegiatan serta disesuaikan dengan dalam waktu 14 minggu (kurang lebih 5 bulan).

Tabel jadwal penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4** Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Sep	Okt				Nov		Des			Jan			Feb
		2019	2019				2019		2019			2020			2020
		4	1	2	3	4	1	2	1	2	3	2	3	4	1
1	Identifikasi Masalah														
2	Pengajuan Judul dan Tinjauan Pustaka														
3	Pengumpulan Data														
4	Pengolahan Data														
5	Analisis dan Pembahasan														
6	Simpulan dan Saran														

Sumber : Data Penelitian (2020)